

**PENGARUH PAD DAN DAK TERHADAP BELANJA MODAL DI
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**THE EFFECT OF PAD AND DAK ON CAPITAL EXPENDITURE IN THE
PROVINCE OF NUSA TENGGARA TIMUR**

Aldo Alfonsus Hunggurami¹, Yuniarti Reny Renggo²

^{1,2} Universitas Kristen Wira Wacana Sumba

renyrenngo@gmail.com

Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal. Subjek dalam penelitian ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/kota Di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017 – 2019. Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 21 kabupaten dan 1 kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang bersumber dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) dari tahun 2017 - 2019. Teknik Pengumpulan data yaitu dengan menelusuri website Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Nusa Tenggara Timur. Teknik analisis data yang digunakan adalah Regresi Data Panel. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal.

Kata kunci: PAD, DAK, dan Belanja Modal

Abstract : This research aims to determine the Regional Original Income (PAD) and special allocation fund (DAK) on capital expenditures. The subjects in this study were the Regency/City Regional governments in the province of east Nusa Tenggara in 2017 – 2019. This study used a sample of 21 Regencies and 1 city in east Nusa Tenggara province which were sourced from the Realization Report of the Regional Revenue And Expenditure Budget (APBD) from 2017 – 2019. The data collection technique is by browsing the wesite of the Central Statistics Agency (BPS) of east Nusa Tenggara Province. The data analysis techniqueseused is panel data Regression. The results in this study indicate that the Regional Original Income (PAD) and the Special Allocation Fund (DAK), have a positive and significant effect on Capital Expenditures.

Keywords : PAD, DAK, and Capital Expenditures

PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami peningkatan setelah pelaksanaan otonomi daerah. Dimana salah satu unsur dalam otonomi daerah adalah dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kemajuan PAD harus didukung oleh PEMDA dengan bekerja dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, dimana PAD dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Renggo, 2019). PAD di tiap wilayah tentunya berbeda-beda tergantung dari sumberdaya yang dimiliki oleh daerah tersebut, daerah yang maju di sektor industri dan kaya akan sumber daya alam cenderung memiliki PAD yang meningkat dibandingkan daerah lain, begitu pula sebaliknya. Oleh karena itu, terjadi ketimpangan PAD di tiap Kabupaten/kota (Pangestu p et al., 2019).

Kendala yang dihadapi PEMDA yaitu dalam menjalankan kewajiban daerah, sehingga menurunnya pendapatan daerah di mana pendapatan daerah yang menurun, dikarenakan PEMDA kurang bebas dalam mengelola keuangan daerah (Nur, 2015).

Nilai PAD menentukan tingkat kemandirian dari suatu daerah dan merupakan modal utama dalam melakukan pembiayaan pembangunan daerahnya. Pemda dituntut agar mampu meningkatkan pendapatan dengan menggunakan

sumber yang ada di daerah. Dengan sumber daya setiap daerah yang berbeda-beda akan menyebabkan ketimpangan (Pangestu p et al., 2019), oleh karena itu dana perimbangan diberikan kepada setiap daerah.

Tujuan adanya transfer yaitu untuk menurunkan kesenjangan fiskal dalam daerah sekaligus untuk meningkatkan kapasitas tercapainya pelayanan publik. Berikut data Penerimaan Realisasi PAD Tahun 2017 – 2019.

Tabel. 1
Target dan Realisasi PAD Tahun
2017 – 2019 (Ribuan Rupiah)

Ket	2017	2018	2019
Target PAD	2.397,02	2.615,35	2.849,53
Realisasi PAD	2.031,07	1.413,24	1.717,58

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS)

Realisasi dan target PAD, realisasi PAD pada tahun 2017 sebesar Rp. 2.031,07, sedangkan target sebesar 2.397,02, pada tahun 2018 terjadi penurunan realisasi menjadi Rp. 1.413,24, dan target sebesar 2.615,35 pada tahun 2019 meningkat sebesar Rp. 1.717,58, dan target 2.849,53, dari data realisasi PAD tahun 2017 – 2019 terjadinya fluktuatif, sedangkan target PAD tiap tahunnya meningkat, hal ini dapat di kategorikan bahwa dari tahun 2017 – 2019 22 Kabupaten di Prov NTT belum efektif dan efisien dalam

menggali serta mengelola aset daerahnya, hal ini dikarenakan realisasi PAD belum mencapai atau melampaui target, atau belum bisa dikategorikan terjadinya desentralisasi atau kemandirian daerah di Provinsi NTT.

Belanja modal merupakan pembiayaan daerah dengan tujuan untuk menambah serta meningkatkan modal seperti aset tetap yang dapat menambah masa manfaat & juga untuk meningkatkan kapasitas & mutu aset dalam daerah. Permasalahan yang terjadi adalah kurangnya penyerapan anggaran belanja modal sehingga berdampak pada melambatnya proses pembangunan.

Dengan adanya PERMENDAGRI No.37 thn 2014, tentang penyusunan APBD, terdiri dari: penghasilan suatu daerah yang dimasukkan dalam APBD itu dijadikan sebuah ukuran dan diperkirakan secara sehat serta memiliki alasan yang sah untuk mendapatkannya. Berikut adalah tabel APBD Prov NTT thn 2017 – 2019.

Tabel 2
APBD Provinsi NTT Tahun 2017-2019 (Ribu Rupiah)

THN	PAD (Rp)	DAK (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)
2017	2.031,075,989	3.720,228,925	4.598,823,421
2018	1.413,242,692	4.141,969,692	4.275,506,035
2019	1.717,583,096	4.883,001,453	5.015,356,200

Sumber: BPS Provinsi NTT

Pada tahun 2017 PAD sebesar 20,3 persen, tahun 2018 penurunan sebesar 14,1 persen, sedangkan thn 2019 PAD meningkat sebesar 17,2 persen, Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2017 – 2019 terjadinya fluktuasi. DAK tahun 2017 yaitu 37,3 persen, tahun 2018 DAK meningkat sebesar 41,5 persen, dan pada tahun 2019 DAK juga meningkat yaitu menjadi 49 persen, dapat disimpulkan bahwa DAK dari tahun 2017–2019 mengalami peningkatan tiap tahunnya. Belanja Modal thn 2017 yaitu sebesar 46 persen, pada tahun 2018 Belanja Modal mengalami penurunan yaitu menjadi 42,8 persen, pada tahun 2019 Belanja Modal meningkat sebesar 50,2 persen, hal ini diputuskan bahwa dapat Belanja Modal dari tahun 2017–2019 terjadinya fluktuasi.

Menurut Arni Asari & Suardana (2018), pengeluaran daerah merupakan tanggung jawab PEMDA untuk menurunkan nilai kekayaan bersih. Belanja daerah khususnya kabupaten/kota terutama dipakai untuk menyelenggarakan urusan PEMDA yang menjadi tanggung jawab utama pemerintah provinsi dan PEMDA, termasuk kewenangan wajib dan kewenangan pilihan yang diatur dalam undang-undang.

Target dan Realisasi PAD masih mengalami fluktuasi atau belum mencapai target PAD, sehingga pemerintah daerah masih harus berjuang untuk menciptakan

pembangunan yang lebih efektif, oleh karena itu perlu untuk melihat pengaruh PAD dan DAK terhadap Belanja Modal.

TINJAUAN PUSTAKA

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

APBD adalah anggaran yang mempunyai elemen-elemen berikut: perencanaan pelaksanaan kegiatan regional, deskripsi terperinci dan tujuan peringkat biaya minimum sangat relevan dengan kegiatan, dan keberadaan beban pengeluaran batas maksimum yang dieksekusi, jenis usaha dijelaskan dalam satu tahun anggaran Ferina & Puspita (2012).

Arni Asari & Suardana(2018), menyatakan bahwa pembiayaan regional menerima penerimaan dan/atau semua jenis penerimaan untuk diterima lagi baik dalam anggaran pada tahun fiskal berikutnya

Struktur APBD selama penerimaan/pendapatan daerah, DAK, investasi modal. Anggaran pendapatan regional dan perbedaan investasi anggaran pada peralatan telah menyebabkan defisit surplus atau APBD. Jika diperkirakan anggaran pendapatan regional lebih besar dari anggaran daerah, surplus akan terjadi. Jika diperkirakan bahwa anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) di wilayah ini lebih kecil dari anggaran investasi modal, defisit anggaran akan diproduksi. Surplus

APBD dipakai untuk mentransfer pembiayaan hutang, partisipasi modal lokal (investasi), pemerintah pusat/daerah, pemesanan dana, dan dana residual yang dieksekusi untuk membiayai pengeluaran tahun. Kamu akan melakukannya. Defisit APBD didirikan dalam pembiayaan untuk menutupi defisit yang diberikan berdasarkan sisa perhitungan anggaran, sehingga pendapatan, penerimaan pinjaman dan penjualan kekayaan regional dipisahkan. Terima lagi untuk menerima obligasi penerimaan pinjaman.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan merupakan penghasilan yang sumbernya dari perekonomian daerahnya. Pendapatan yaitu digunakan secara maksimal agar tidak terjadinya penurunan tingkat PAD.

Tiap daerah/wilayah diberi tanggung jawab untuk menelusuri serta menghasilkan sumber penerimaan daerahnya. Peningkatan pendapatan asli daerah ini adalah kunci utama dalam daerah otonom, karena adanya kemandirian keuangan daerah yang merupakan tolok ukur keberhasilan dalam meningkatkan otonomi daerah.

Pajak Daerah

UU No. 34 Thn 2000 bahwa pajak adalah iuran wajib masyarakat kepada daerah, dan di paksa berdasarkan PERPU yang berlaku, dan digunakan untuk melakukan

pembiayaan dalam menjalankan penyelenggaraan PEMDA untuk pembangunan daerah.

Berdasarkan definisi pajak daerah, maka ciri pajak daerah yaitu:

1. Berdasarkan undang – undang bahwa pajak dipungut dengan sistem pemaksaan.
2. Penyetoran pajak tidak adanya sistem kontraprestasi secara langsung, dikarenakan bahwa pajak wajib dipungut.
3. Pajak daerah dipungut secara langsung oleh PEMDA.
4. Pajak dipungut dengan tujuan untuk kemakmuran rakyat dalam daerah.

Retribusi Daerah

UU No. 34 Thn 2000, diartikan bahwa pemungutan retribusi untuk angsuran administrasi atas jasa pemberian izin yang secara tegas oleh PEMDA untuk mendasari pelayanan publik. Jenis retribusi yaitu: Permintaan bantuan publik jasa umum, jasa usaha dan perizinan.

Berkaitan dengan retribusi sebagai sumber PAD, permintaan bantuan publik/jasa usaha Pasal 2 ayat (2) Peraturan PEMDA No. 66 thn 2001, bahwa retribusi kesehatan kesejahteraan, pelayanan sampah, untuk pencetakan kartu karakter dan persetujuan pendaftaran umum, administrasi pemakaman, permintaan administrasi pasar, permintaan pengujian kendaraan mesin, pembalasan untuk penilaian pemadam kebakaran, pencetakan

peta biaya, dan tuntutan pengujian kapal penangkap ikan. Pekerjaan ini diselesaikan yaitu dengan memberikan kesejahteraan publik secara profesional serta mampu meningkatkan kepuasan atas penerimaan pelayanan publik.

Pendapatan retribusi berkaitan erat dengan banyaknya pelayanan pemerintah, masyarakat, dan sebaliknya maka akan semakin meningkat pembayaran retribusi daerah.

Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Upaya untuk menelusuri potensi atau sumber dari penerimaan daerah dapat diselesaikan dengan cara yang berbeda - beda, selama tidak bertolak belakang dengan UU dan pedoman yang relevan. Sumber pendapatan daerah perlu di perhatian secara khusus untuk menjalankan BUMD. Perusahaan Daerah adalah unit penciptaan yang menawarkan jenis bantuan, mengkoordinasikan penggunaan publik, dan menghasilkan pendapatan.

Perusahaan daerah adalah sumber untuk meningkatkan PAD, perusahaan daerah adalah BUMD yang didirikan oleh PEMDA dengan tujuan untuk menambah nilai kekayaan bersih agar mampu meningkatkan perkembangan perekonomian daerah. Hasil BUMD yaitu salah satu sumber pendapatan daerah meskipun memiliki potensi yang luas namun administrasi

perusahaan yang amatir selain dengan campur tangan pemerintah daerah maka kontribusi PAD kurang maksimal.

Lain-Lain PAD Yang Sah

Nur (2015) menegaskan bahwa jenis PAD lain yang sah diharapkan dapat digunakan dalam anggaran penghasilan, yang dikecualikan dari pajak, jenis retribusi, & sesuai peruntukannya. Penghasilan meliputi: Produk yang dijual oleh aset daerah. Tidak dalam bentuk tunai atau biaya, giro, pendapatan bunga, kompensasi daerah, pendapatan komisi, potongan harga atau pendapatan lainnya, pendapatan komisi, potongan harga yang dihasilkan dari penjualan barang dan jasa perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Dana Perimbangan

Dana Perimbangan adalah dana yang sumbernya dari APBN yang ditujukan ke daerah untuk mendanai kebutuhan dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. 3 komponen Dana perimbangan terdiri dari DAU, DAK, dan DBH.

Menurut Santoso (2017) menyatakan bahwa tujuan Dana Perimbangan yaitu untuk mendanai kebutuhan daerah dan dapat menurunkan kesenjangan fiskal antara PP dan Pemkab serta menciptakan keseimbangan keuangan baik keuangan pusat maupun daerah. Salah satu bentuk

DAK yang dikategorikan dalam dana perimbangan yaitu untuk mendanai kegiatan khusus dalam daerah, yaitu sarana prasarana, pengadaan aset, serta meningkatkan pembangunan. Manfaat DAK diharapkan untuk lebih meningkatkan prioritas nasional yang dituang dalam Belanja Modal (Hairiyah et al., 2018).

Dana Alokasi Khusus

DAK adalah dana yang ditujukan ke daerah agar dapat memenuhi kebutuhan khusus. Berikut rincian kebutuhan khusus yang ditetapkan dalam PERPU yang berlaku yaitu:

1. Kriteria kebutuhan tidak dapat diperhitungkan dengan rumus DAU.
2. Kebutuhan untuk meningkatkan pelayanan publik.
3. Kebutuhan untuk melakukan penghijauan oleh daerah penghasil.

Menurut Nur (2015) tujuan DAK yaitu untuk membiayai urusan daerah untuk meningkatkan pelayanan publik. DAK merupakan anggaran dari APBN. Menurut Martini dan kawan-kawan., (2014), tujuan dari DAK yaitu untuk menurunkan kesenjangan prioritas nasional dengan meningkatkan bidang infrastruktur, pendidikan dan kesehatan, kelautan dan perikanan, pertanian, serta sarana prasarana PEMDA, dan lingkungan hidup.

Kategori DAK dibagi menjadi 2 jenis yaitu DAK Fisik yaitu dana yang dialokasikan ke daerah tertentu dalam hal untuk memberikan bantuan sekaligus untuk mendanai kegiatan khusus fisik yang dananya berasal dari APBN, sedangkan DAK non fisik digunakan untuk mendanai kegiatan khusus non fisik. Berikut bagian – bagian DAK.

Belanja Modal

Belanja modal adalah pengadaan barang dan jasa dan dianggarkan dalam pembiayaan APBD dengan tujuan pengadaan aset yang nilai manfaatnya lebih dari 1 tahun dan disesuaikan dalam kegiatan pemerintah daerah. Aset tetap berwujud yang berkaitan dengan pembangunan maka dianggarkan dalam belanja modal. Belanja Modal dapat dikategorikan yaitu: Tanah, gedung, infrastruktur jalan, irigasi, peralatan dan mesin, dan fisik lainnya.

1. Belanja Modal Tanah adalah pembiayaan dan digunakan untuk balik nama kepemilikan tanah, sewa tanah, hingga pengeluaran pembuatan sertifikat sampai tanah siap pakai.
2. Belanja Modal Gedung dan Bangunan yaitu pembiayaan yang digunakan untuk pengadaan, renovasi sampai gedung dan bangunan siap digunakan.
3. Belanja Modal infrastruktur jalan, irigasi adalah pembiayaan untuk pengadaan serta perehapan jalan

dan irigasi untuk menambah kapasitas yang siap digunakan.

4. Belanja Modal Fisik Lainnya adalah pengeluaran untuk pengadaan pembangunan serta barang kesenian lainnya.

Penggunaan modal digunakan untuk penggunaan yang sehubungan dengan pengadaan sumber daya tetap yang substansial dan memiliki nilai manfaat lebih dari 1 tahun dan digunakan dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintah seperti tanah, peralatan dan struktur jalan, irigasi, dan sumber daya tetap lainnya. Nilai perolehan atau pengembangan sumber daya tetap yang substansial yang direncanakan dalam penggunaan modal hanya sebesar biaya pembelian/perakitan sumber daya tersebut. Konsumsi honorarium untuk kelompok penasehat akuisisi dan organisasi pembelian untuk mendapatkan setiap sumber daya yang dianggarkan untuk penggunaan modal dianggarkan untuk penggunaan tenaga kerja atau penggunaan potensial pada tenaga kerja dan produk/barang dan jasa.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Teknik Analisis data yang digunakan adalah menggunakan model regresi data panel, dimana menggunakan data kabupaten kota

pada Provinsi Nusa Tenggara Timur sejak tahun 2017 – 2019.

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variable Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Belanja Modal, dimana model yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$BM = \alpha + \beta_1 X_{it} + \beta_2 x_{it} + \varepsilon$$

Dimana:

Y = Belanja Modal

α = konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = koefisien regresi

Pendapatan Asli Daerah = PAD

Dana Alokasi Khusus = DAK

i = 1. 2. 3...22 (*cross-section* kabupaten/kota prov NTT)

t = 1. 2...3 (*time series* tahun 2017 - 2019)

e = error

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil pengolahan data panel maka harus melakukan pengujian model, yaitu:

Tabel 3
Output Uji Chow

Effect Test	Statistic	d.f	Prob
<i>Cross-section F Chi-Square</i>	29.359051	21	0.1056

Sumber: Hasil olahan Eviews-08

Berdasarkan tabel 3, nilai probabilitas *Cross-section F Chi-Square* yang lebih besar dari alpha 0.05% sehingga menunjukkan *Common Effect* oleh karena itu maka

pengujian data masih berlanjut ke uji *Lagrange Multiplier*.

Tabel 4
Output Uji Lagrange Multiplier

Null Alternative	Cross-Section One-Sided	Both
Breusch-Pagan	0.524783 (0.4688)	0.524787 (0.4688)

Sumber: Hasil olahan Eviews-08

Berdasarkan hasil pengolahan Uji LM (*Lagrange Multiplier*) diatas dapat diketahui bahwa nilai *BP* sebesar 0.4688, sehingga model yang terbaik dalam penelitian ini adalah CEM. Berikut disajikan model yang terbaik dan digunakan dalam penelitian ini:

$$BM_{it} = \alpha + \beta_1 PAD_{it} + \beta_2 DAK_{it} + \varepsilon_{it}$$

$$BM_{it} = 5.11 + 0.683828 PAD_{it} + 0.521833 DAK_{it} + \varepsilon_{it}$$

Prob

= (0.0000) (0.0000)

Adj $R^2 = 0.525991$

Prob (*F – Statistik*) = 0.0000

Nilai konstanta (C) sebesar 5.11 mengandung arti bahwa tanpa adanya PAD dan DAK, maka nilai Belanja Modal sudah sebesar 5.11 persen, atau dengan kata lain jika nilai PAD dan DAK bernilai nol, maka belanja modal sebesar 5.11 Juta Rupiah.

Uji F

Uji F dilakukan untuk menguji keakuratan model dalam melihat pengaruh dari variabel PAD dan

DAK terhadap Belanja Modal Di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017 – 2019, nilai F yang diperoleh dengan menggunakan Common Effect Model adalah sebesar 37.06411 dengan nilai (prob F- Statistik = 0.000000). yang artinya adalah model yang digunakan sudah cukup bagus untuk menjelaskan pengaruh variabel PAD dan variable DAK terhadap variable Belanja Modal.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Setelah mengetahui keakuratan model yang digunakan, maka langkah berikutnya menguji *Goodness of Fit*, yang mana manfaat ini yaitu bisa melihat perbedaan nilai yang diamati dan nilai yang diharapkan dari model penelitian. Pengukuran *Goodness of Fit* adalah dengan Koefisien determinasi R^2 .

Koefisien determinasi dilakukan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi model variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 dan 1. Pengaruh PAD dan DAK Terhadap Belanja Modal Di Prov Nusa Tenggara Timur Tahun 2017–2019 dijelaskan pada tabel 4.7. Nilai R^2 sebesar 0.540576. Hal ini berarti 54.05% variabel PAD dan DAK mampu untuk menjelaskan pengaruhnya terhadap Belanja Modal, sedangkan sisanya 45.05% dijelaskan oleh variabel–variabel diluar model.

Uji T

Analisis Uji T merupakan Uji T Parsial digunakan untuk melihat signifikansi dari variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dalam mempengaruhi variabel Belanja Modal (BM). Besarnya probabilitas menjadi acuan untuk melihat signifikansi dari variabel – variabel independen, jika nilai probabilitas lebih kecil dari $\alpha = 0.05$ atau 5% maka variabel dikatakan signifikan atau mempengaruhi variabel dependen.

Berdasarkan persamaan probabilitas dari masing – masing variabel independen adalah sebesar 0.0000 yang mana artinya adalah 0.0000 lebih kecil dari $\alpha = 0.05$ atau 5% dan variabel PAD dan DAK secara signifikan mempengaruhi variabel belanja Modal di Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2017–2019.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal

Dari hasil pengolahan uji statistik diatas menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal, nilai p-value $0.0000 < 0.05$. Hal ini didukung dalam penelitian yang telah dilakukan oleh (Martini et al., 2014) dalam jurnalnya yang berjudul “Pengaruh PAD, DAU, dan DAK Terhadap Belanja Modal” yang

menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berdampak positif signifikan terhadap Belanja Modal. Hal ini dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Daerah yang berasal dari dalam daerahnya sendiri belum seutuhnya mengelola aset daerahnya.

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan seiring dan sejalan dengan tujuan penelitian dan hipotesis yang dibangun, bahwa PAD berdampak positif dan signifikan terhadap Belanja Modal di Provinsi NTT tahun 2017 – 2019.

Dengan adanya kebijakan mengenai otonomi daerah tentunya Pemerintah Pusat memberikan wewenang yang luas untuk Pemda dengan tujuan untuk dapat mengembangkan potensi yang ada di daerahnya dengan tujuan untuk menambah pendapatan dari dalam daerahnya sendiri.

Pengaruh yang positif ini dapat menggambarkan bahwa dengan Pendapatan Asli Daerah yang semakin tinggi maka akan meningkatkan pula belanja modal yang dialokasikan oleh pemerintah daerah.

Dengan kata lain semakin meningkatnya Pendapatan Asli Daerah maka akan semakin meningkat pula fasilitas publik yang disediakan oleh pemerintah, dimana pemerintah mulai meningkatkan pembangunan pada sarana dan prasarana yang terutama pada pembangunan infrastruktur.

Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Modal

Dana Alokasi Khusus menyatakan berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal, hal ini dapat diketahui dari nilai p-value $0.0000 < 0.05$. Hal ini didukung dalam penelitian yang dilakukan oleh (Wandira, 2013) dalam jurnalnya yang berjudul “Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan DBH Terhadap Pengalokasian Belanja Modal” yang menyatakan bahwa DAK berdampak positif signifikan terhadap Belanja Modal.

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan seiring dan sejalan dengan tujuan penelitian dan hipotesis yang dibangun, bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal di Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2017–2019. Dengan adanya transfer Dana Alokasi Khusus dari Pusat ke daerah tentunya memiliki tujuan yang mensejahterakan masyarakat antara lain untuk mengatasi ketimpangan serta secara umum untuk meningkatkan kinerja prioritas nasional dalam daerah.

Pengaruh positif antara Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal menjelaskan bahwa Anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah melalui APBN untuk meningkatkan pembangunan suatu daerah sesuai dengan kebijakan dan program nasional dapat meningkatkan fasilitas

publik dan sarana prasarana melalui belanja modal, dimana salah satu manfaat DAK adalah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam menyediakan sarana dan prasarana daerah.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pemerintah Daerah perlu untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta memanfaatkan secara efektif dana perimbangan yang diberikan oleh pemerintah pusat salah satunya adalah Dana Alokasi Khusus (DAK), karena akan meningkatkan Belanja Modal.

Belanja Modal sangat bermanfaat bagi daerah dimana belanja modal memberikan manfaat jangka Panjang, terhadap pelayanan publik. Kebutuhan atas belanja modal juga didasarkan akan sarana dan prasana yang dibutuhkan oleh setiap daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Arni Asari, N. M., & Suardana, K. A. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah pada Belanja Daerah. *E-Jurnal Akuntansi*, 25, 877.
- Badan Pusat Statistik Nusa Tenggara Timur (NTT) Tahun 2017 - 2019.
- Ferina, I. S., & Puspita, H. (2012). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Belanja Daerah (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Sumatera Barat). 4(3), 10–15.
- Hairiyah, H., Malisan, L., & Fakhroni, Z. (2018). Pengaruh dana alokasi umum DAU dana alokasi khusus DAK dan pendapatan asli daerah PAD terhadap belanja modal. *Kinerja*, 14(2), 85.
- Martini, N. L. D. S., Cipta, W., & Suwendra, I. W. (2014). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten Buleleng Tahun 2006 - 2012. *E-Journal Bisma Universitas Pendidikan Ganेशha*, 2(1), 1.
- Nur, M. (2015). Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap Belanja Daerah di Sulawesi Selatan. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, 5(1), 78–88.
- Pangestu p, P., Riany, M., Paramita J.S, E., & Sundaning K, E. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. *Jurnal Akuntansi & Keuangan Unja*, 4(4), 26–32.

- Renggo, Y. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Pembangunan Daerah Di Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Alpha*, 8(5), 55.
- Santoso, E. (2017). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 6, 2460–0585.
- Wandira, A. (2013). Pengaruh Pad, Dau, Dak, Dan Dbh Terhadap Pengalokasian Belanja Modal Arbie. 2(33).